



ISU BENCANA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Editor:
June Cahyaningtyas & Ludiro Madu



ISU BENCANA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Penulis : Syamsul Maarif
Erna Kurniawati
Anik Yuniarti
Ludiro Madu
Sri Issundari
Tri Fitriani Puspitasari
Iva Rachmawati

Aryanta Nugraha
June Cahyaningtyas
Machya Astuti Dewi
Desy Nur Aini
Yulius Purwadi Hermawan
Hikmatul Akbar
Muhadi Sugiono

Alban Sciascia
Sundoro Agung Nugroho
Suryo Wibisono
Bastian Yunariono
Kepri Marudur
Ratnawati
Titus Bransma Heru

Editor : June Cahyaningtyas
Ludiro Madu

Edisi Pertama
Cetakan Pertama, 2013

Hak Cipta © 2013 pada penulis,
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A
Yogyakarta 55283
Telp. : 0274-889836; 0274-889398
Fax. : 0274-889057
E-mail : info@grahailmu.co.id

Maarif, Syamsul; Kurniawati, Erna, dkk.

ISU BENCANA dalam Hubungan Internasional/Syamsul Maarif; Erna Kurniawati, dkk.
-Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013
xii + 166 hlm, 1 Jil.: 26 cm.

ISBN: 978-602-262-047-1

1. Hubungan Internasional

I. Judul



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	v
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAGIAN I: BENCANA DAN <i>DISASTER DIPLOMACY</i>	1
1. Penanggulangan Bencana Sebagai Diplomasi <i>Soft Power</i> Indonesia -Syamsul Maarif-	1
2. Kompleksitas Hubungan Dua Korea dan <i>Disaster Diplomacy</i> : Belajar dari Bantuan Bencana Korea Selatan Terhadap Korea Utara -Erna Kurniawati-	11
3. Penanganan Bencana Alam dalam Wacana Pembangunan <i>ASEAN Community 2015</i> -Anik Yuniarti-	17
4. Peran Bencana Tsunami dalam Resolusi Konflik Antara GAM dan Pemerintah RI: Promosi Perdamaian Positif Melalui Kerjasama Internasional -Ludiro Madu-	29
BAGIAN II: BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM BENCANA	37
5. Bantuan Kemanusiaan dalam Kerangka Diplomasi Publik Amerika Serikat -Sri Issundari-	37
6. Etika Bantuan Kemanusiaan: Politisasi Bantuan Kemanusiaan Bencana Gempa Haiti, 2010 -Tri Fitriani Puspitasari-	43
7. <i>Humanitarian Assistance</i> dan Kebijakan Negara -Iva Rachmawati-	49
BAGIAN III: BENCANA DAN ISU KEAMANAN	57
8. Bencana Alam dan Aspek Keamanan Non-Tradisional dalam Perspektif Regional ASEAN -Aryanta Nugraha-	57
9. Bencana, Efek Media, dan Konflik: Pengalaman Indonesia dan Sri Lanka Pasca Bencana Tsunami 2004 -June Cahyaningtyas-	67
10. Perempuan dan Bencana Alam: Korban atau Agen Pembangunan? -Machya Astuti Dewi-	75

11. Bencana Kekeringan, Kemiskinan dan Ketidakadilan Sebagai <i>Root Causes</i> Konflik di Sudan -Desy Nur Aini-	81
BAGIAN IV: SOLIDARITAS TRANSNASIONAL DALAM PERISTIWA BENCANA	89
12. Mengelola Modal Sosial dan Solidaritas Transnasional dalam Penanganan Dampak Bencana Lokal -Yulius Purwadi Hermawan-	89
13. Peran Pemerintah dan NGO dalam Penanggulangan Bencana Alam di China -Hikmatul Akbar-	105
14. <i>Towards a Disaster Resilient Society in Indonesia a Lesson From Great East Japan Earthquake /Tsunami</i> -Muhadi Sugiono-	117
BAGIAN V: PERAN NEGARA DALAM KEBENCANAAN	123
15. <i>Sea Power and Disaster Relief Operations</i> -Alban Sciascia-	123
16. <i>Civil-Military Coordination (Cimic)</i> dalam Bantuan Kemanusiaan :Studi Kasus Masa Tanggap Darurat Letusan G. Merapi 2010 -Sundoro Agung Nugroho-	133
17. Peran TNI dalam Tanggap Darurat Bencana -Suryo Wibisono-	143
18. Kebijakan Keamanan Pangan di India -Bastian Yunariono dan Kepri Marudur-	149
19. Menyorot Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Peristiwa Pencemaran Laut Timor -Ratnawati dan Titus Bransma Heru-	157
DAFTAR PENULIS	163

Kebijakan Keamanan Pangan di India -Bastian Yunariono dan Kepri Marudur-

Pendahuluan

Keamanan pangan merupakan salah satu isu mendasar bagi India. Kekurangan pangan selalu menjadi ancaman bagi negara itu. Dalam sejarahnya, pada tahun 1943 India pernah mengalami bencana kelaparan yang mengakibatkan 3 juta orang meninggal. Dekade selanjutnya kondisi keamanan pangan India diperburuk oleh tingkat kecukupan nutrisi yang tidak terdistribusi merata bagi seluruh penduduk. Selain ketersediaan pangan terbatas, keadaan lain yang menyebabkan India tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya adalah harga pangan yang semakin tinggi, tidak sebanding dengan daya beli masyarakat yang rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan India untuk meningkatkan keamanan pangan. Misalnya, sejak tahun 1960 India membuat kebijakan Revolusi Hijau. Kebijakan keamanan pangan ini berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi bahan pangan pokok seperti gandum dan padi serta menjaga kestabilan harga pangan ("Organic Farming in India", <http://www.organicfacts.net/organic-cultivation/organic-farming/organic-farming-in-india.html>).

Keberhasilan Revolusi Hijau selama beberapa dekade tidak berlangsung secara berkesinambungan dan menimbulkan implikasi negatif. Dampak yang ditimbulkan antara lain kesuburan tanah yang menurun akibat penggunaan pupuk serta obat-obatan kimia secara berlebihan (Penerbit Buku Kompas, 2007: 136).

Masalah lain di bidang pangan di India adalah kemampuan penduduk untuk mendapatkan akses pangan yang berkualitas dan dalam jumlah minimal. Pada tahun 2004-2005 tingkat pengangguran India sangat tinggi baik di perkotaan maupun pedesaan (Ministry of Labor, India, 2010: 7). Tingginya angka pengangguran ini menyebabkan sebagian besar masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Azad India Foundation, menyatakan bahwa pada tahun 2006 terdapat sekitar 38% atau 400 juta penduduk India dalam kategori miskin ("Poverty in India", <http://www.azadindia.org/social-issues/poverty-in-india.html>). Terdapat dua bentuk kemiskinan di India yang sulit dipecahkan, yaitu kemiskinan-urban atau perkotaan dan kemiskinan pedesaan. Penyebab utama kemiskinan perkotaan antara lain karena kaum tani pedesaan melakukan urbanisasi dari desa ke kota untuk mencari kehidupan. Ketika tinggal di kota, mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan kemiskinan di pedesaan disebabkan tidak efektifnya program pemerintah dalam menyediakan sarana pertanian yang baik, seperti sarana irigasi. Hal ini berimplikasi seringnya gagal panen dan rendahnya produktifitas sektor pertanian. Dampak selanjutnya petani memiliki banyak utang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sejak menjadi Perdana Menteri India pada tahun 2004, Manmohan Singh, menyatakan kebangkitan kembali pertanian India atau "Revolusi Hijau Kedua." Meskipun India dalam bidang ekonomi telah mengalami kemajuan yang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi Asia namun jumlah penduduk yang besar, sekitar 1,2 miliar jiwa, isu kelaparan dan kekurangan gizi tetap menjadi ancaman India dewasa ini dan di masa mendatang. Diperlukan ketersediaan jumlah bahan pangan yang besar untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan bagi seluruh penduduk dan harga yang terjangkau.

Melalui berbagai program, PM. Manmohan Singh secara bertahap berhasil meningkatkan produktifitas pertanian. Berbagai jenis hasil pertanian India seperti gandum, beras, sereal, susu dan cream, jambu, kacang, buah, bumbu, minyak nabati dan hewani tersedia dalam jumlah yang cukup besar. Sebagai ilustrasi, jika pada awal kemerdekaan tahun 1947, produksi gandum India hanya 9 juta ton, tahun 2010 meningkat menjadi 80,7 juta ton. Cadangan pangan dalam bentuk biji-bijian mencapai 30 juta ton. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir produksi padi naik lima kali lipat sedangkan kentang naik 15 kali lipat (*Kompas*, 26 Oktober 2010).

Berdasarkan perkembangan tersebut India mengalami kemajuan dalam keamanan pangan. Jika sebelumnya menjadi negara pengimpor bahan pangan sekarang menjadi ekportir bahan pangan. Perkembangan tersebut menjadikan India sebagai harapan pemasok bahan makanan di kawasan Asia Selatan maupun global pada masa mendatang.

Paparan berikut menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan perdana menteri Manmohan Singh untuk meningkatkan keamanan pangan India.

Keamanan Pangan dan Masalah Pertanian di India

The World Food Summit 1996 mendefinisikan keamanan pangan sebagai keadaan dimana setiap orang dan sepanjang waktu memiliki akses untuk mencukupi kebutuhan pangan, makanan bergizi untuk menjaga kesehatan dan aktivitas kehidupannya. Keamanan pangan dibangun berdasarkan tiga pilar: *Pertama*, ketersediaan makanan. Hal ini diasumsikan ketercukupan kuantitas makanan secara konsisten. *Kedua*, kemudahan akses mendapatkan makanan, yaitu ketercukupinya sumber-sumber untuk mendapatkan nutrisi. *Ketiga*, ketersediaan air dan sanitasi (www.who.int/trade/glossary).

Sebagai deskripsi terdapat tiga masalah pertanian India, fondasi keamanan pangan, yaitu kesuburan tanah, ketersediaan air dan ketersediaan lahan pertanian. Kesuburan tanah merupakan salah satu masalah utama pertanian di India. Setelah Revolusi Hijau sistem pengolahan pertanian di India dilakukan intensif dengan menggunakan pupuk kimia. Meskipun pada awalnya penggunaan pupuk kimia mampu meningkatkan hasil pertanian namun dalam jangka panjang menimbulkan kerusakan tanah. Penggunaan pupuk kimia menyebabkan tanah kehilangan unsur hara dan bersifat basa. Diperkirakan pada tahun 2000 sekitar 146.820.000 hektar tanah telah mengalami degradasi kesuburan.

Masalah kedua yang dihadapi India adalah ketersediaan air. Meskipun curah hujan di India cukup tinggi namun tidak meratanya distribusi air menjadi sumber kesulitan pertanian India. Tidak adanya ketepatan waktu distribusi air untuk irigasi menjadi kendala besar bagi India dalam mencapai produktifitas dan stabilitas pertanian di berbagai negara bagian. Selain itu, kaum petani juga mengalami "kekalahan" dalam perebutan akses irigasi dengan pemodal besar. Sulitnya mendapatkan air, membuat petani semakin tertekan dalam hutang. Hal ini selanjutnya menyebabkan tingginya angka kasus bunuh diri petani India (www.who.int/trade/glossary).

Kebijakan Manmohan Singh India Mengatasi Masalah Pangan Kebijakan Domestik

Sejak awal 1990-an, India mengalami reformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian. Berbagai kebijakan ditempuh India untuk menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Kebijakan domestik yang dikembangkan Manmohan Singh diantaranya diversifikasi pertanian dan pengembangan tanaman organik; perbaikan sarana irigasi; dan reformasi aset pertanian.

Salah satu kebijakan yang dilakukan PM Manmohan Singh untuk meningkatkan produktifitas pertaniannya adalah melalui diversifikasi pertanian dengan pengembangan sayuran, susu, daging, dan produk ikan. Kebijakan diversifikasi

tanaman. Diversifikasi pertanian membantu India meningkatkan produktifitas makanan dengan pengembangan infrastruktur dan mendirikan lembaga-lembaga pengkajian yang memberi nilai dan sistem kerja inovatif.

Dalam melakukan diversifikasi tanaman, Pemerintah India berupaya mengalihkan tanaman tradisional menjadi tanaman komersial, dimana potensi irigasi tadah hujan disekitar lahan pertanian terus dibangun. Pemerintah India juga memotivasi petani untuk menanam sayur-sayuran tanpa mengandalkan bahan pestisida dan pupuk kimia yang dapat merusak kesuburan tanah. Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia pemerintah India mengalokasikan anggaran besar untuk membangun jaringan irigasi dan pabrik pupuk organik. Saat ini India merupakan negara terbesar kedua setelah Cina yang memproduksi pupuk (*Kompas*, 10 Oktober 2010).

Selain itu Manmohan Singh mengembangkan “Proyek Nasional Pertanian Organik”. Adapun instrumen yang akan diwujudkan adalah: *National Project on Organic Farming*, <http://india.gov.in/sectors/agriculture/national.php>

1. Pengembangan lembaga penyedia pelayanan pertanian.
2. Dukungan keuangan dan teknis untuk mendirikan unit-unit produksi organik, seperti kompos sampah, pupuk hayati dan biopestisida.
3. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan demonstrasi.
4. Kualitas kontrol tanaman organik.

Sebagai upaya berkelanjutan untuk promosi bio-pupuk, telah dibangun sekitar 169 unit produksi bio-pupuk dengan kapasitas 67.000 *metric ton* (MT). Diperkirakan produksi tahunan diatas 20 ribu ton bio-pupuk dan lebih dari 18.800 ton biopestisida. Melalui upaya ini telah diciptakan pengolahan 708 ton limbah pertanian untuk kompos. Produk perharinya sekitar 5.606 MT bio-pupuk dan lebih dari 17.000 ton *Vermiculture* dan *kascing*. Sejak peluncuran skema ini, daerah pertanian organik meningkat 20 kali lipat dari 42.000 ha (2003-2004) menjadi 865.000 ha (2007-2008). Hasil upaya ini produksi pangan organik telah meningkat dari 4,09 ton lakh pada tahun 2006-2007 menjadi 9,02 ton lakh pada tahun 2007-2008 (*National Project on Organic Farming*, <http://india.gov.in/sectors/agriculture/national.php>).

Sedangkan untuk mengatasi distribusi air, selama tahun 2006-2007, Pemerintah India mengambil langkah-langkah dalam mengatasi pasokan air. Kebijakan yang dikembangkan adalah Proyek Pembangunan Nasional Hulu untuk daerah tadah hujan atau *The National Watershed Development Project for Rainfed Areas* (NWDPR). Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan produktifitas pertanian India yang sangat memerlukan air hujan. Adapun beberapa tujuan NWDPR adalah sebagai berikut (Dept of Agriculture and Cooperation, India, 2006/2007):

1. Konservasi lingkungan, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
2. Peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
3. Restorasi keseimbangan ekologi pada ekosistem tadah hujan yang terdegradasi dan program penghijauan. Program ini dilakukan melalui penanaman pohon, semak dan rumput.
4. Pengurangan kesenjangan regional antara daerah tadah hujan dan irigasi.

Upaya lain yang dilakukan Manmohan Singh adalah dengan melakukan reformasi aset pertanian atau penciptaan lahan bagi produk-produk tanaman pangan. Antara tahun 2006-2008, meskipun tidak terlalu besar terjadi peningkatan jumlah lahan yang digunakan untuk bahan tanaman. Misalnya lahan untuk tanaman padi meningkat dari total 22 % menjadi 23 %, begitu juga dengan tanaman pangan lainnya seperti jagung. Total area pertanian pun meningkat, jika tahun 2000 seluas 725.000 hektar menjadi 750.000 hektar pada tahun 2009. Selain itu untuk menunjang pengembangan tanaman pangan sejak tahun 2004, Manmohan Singh mengeluarkan kebijakan regulasi kredit pertanian yang komperhensif bagi para petani. Pemerintah India menargetkan aliran kredit sebesar 30% pertahun bagi petani, restrukturisasi utang petani dan peningkatan peranan koperasi kredit pertanian (*National Project on Organic Farming*, <http://www.India.gov.in/sectors/agriculture/national.php>).

Kebijakan Eksternal

Sedangkan kebijakan eksternal yang dilakukan Manmohan Singh adalah melakukan kerjasama teknologi pertanian dengan negara-negara Asia, Afrika dan Eropa. Misalnya, pada tanggal 29 September – 3 Oktober 2008 di Taiwan, India dan negara-negara Asia Pasifik, diantaranya Indonesia, Iran, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Taiwan ROC, Thailand, Sri Lanka, dan Vietnam menyelenggarakan pertemuan untuk membahas pengelolaan pertanian dan peningkatan kualitas air (<http://www.agnet.org/library/ac/2008c/>). Selain itu, India dengan negara-negara Afrika mengadakan MoU tanggal 28 Februari - 5 Maret 2010 di Hyderabad. Dua belas negara Afrika, diantaranya Kenya, Mali, Niger dan Sudan. India dan negara-negara tersebut melakukan kerjasama dalam memproduksi peralatan pertanian, konservasi tanah dan air, bio-bahan bakar, pengelolaan pasca panen dan penelitian bersama. Selanjutnya India dan Perancis pada tanggal 6 Desember 2010 menandatangani *Letter of Intent* untuk melakukan kerjasama bilateral dalam pengolahan makanan.

Upaya intensif yang ditempuh Manmohan Singh untuk menjaga keamanan pangan juga dilakukan melalui forum *World Trade Organization* (WTO). Organisasi perdagangan ini pada awalnya memiliki tujuan normatif, yaitu agar perdagangan berjalan lancar sehingga barang dan jasa yang bisa tersebar secara merata ke seluruh dunia. Namun dalam perkembangannya WTO digunakan sebagai instrumen negara maju untuk mengembangkan kapitalisme global. Isu yang menjadi perdebatan diantaranya mengenai Perjanjian pertanian AOA (*Agreement on Agriculture*). Melalui AOA, WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk membuka pasar domestik untuk barang-barang impor dan sebaliknya. Terdapat tiga hal yang diatur AOA, yaitu : *Market Acces* (akses pasar), perjanjian ini mewajibkan negara-negara anggota menurunkan tarif dasar impor pertanian.

1. *Domestic Support* (dukungan domestik), aturan ini mewajibkan dibatasinya subsidi dan proteksi terhadap sektor pertanian.
2. *Export subsidy* (subsidi ekspor), kebijakan ini mewajibkan dibatasi atau dihapuskannya subsidi ekspor produk pertanian.

Dua eksportir utama pertanian dunia, yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat diuntungkan dengan perjanjian ini. Jika tarif dasar impor diturunkan, mereka bisa menjual produksi mereka dengan harga murah di negara-negara berkembang. Sebelum aturan AOA, tarif impor dikenai pajak yang tinggi sehingga harganya lebih tinggi dari produk dalam negeri. Namun adanya penurunan tarif impor membuat harga barang impor lebih murah. Akibatnya produsen pertanian negara berkembang, seperti India mengalami kerugian.

Selain itu, dengan adanya larangan subsidi dan proteksi terhadap pertanian membuat petani menjadi rentan. Harga produk mereka fluktuatif, ketersediaan benih dan pupuk juga tidak terjamin dan harganya tidak stabil. Petani negara berkembang juga tidak mendapatkan subsidi ekspor sehingga jika mereka ekspor produknya, harganya akan mahal dan sulit bersaing dengan produk pertanian Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sebaliknya Amerika Serikat dan Uni Eropa, melakukan pelanggaran terhadap AOA dengan tetap mensubsidi petaninya. Selain itu, perusahaan agribisnis negara-negara maju memiliki teknologi pertanian yang maju, modal besar dan struktur organisasi yang kuat. Perusahaan-perusahaan tersebut berhasil membanjiri produk-produk mereka ke negara-negara berkembang.

Melihat kondisi tersebut timbul berbagai demonstrasi petani India. Misalnya, pada tanggal 8 Oktober 2005 kelompok-kelompok petani di India seperti *Bhratiya Kisan Union*, dan *Karnataka Rajya Sanghe* mengorganisir aksi protes (*Tribune India*, 12 Maret 2011). Petani-petani dalam kelompok tersebut datang dari negara bagian Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh dan Rajahstan. Hal ini sangat ironi mengingat India merupakan 12 negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar dan 58% penduduk India bekerja disektor pertanian. Di sisi lain Amerika Serikat juga telah mendorong akses pasar yang lebih luas terhadap tanaman tertentu seperti jagung, beras, kapas, kedelai. Tanaman - tanaman tersebut disubsidi pemerintah AS dan dijual ke pasar dunia sehingga merugikan jutaan petani India.

Sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan pangannya dan merespon gerakan-gerakan tersebut bersama negara-negara berkembang anggota WTO, India berupaya melakukan pengurangan tarif yang lebih besar (Gopinath & Laborde, 2008: 3). Sebagai anggota dari G 20 dan G 33, India menyerukan pengurangan tarif dan instrumen kuota untuk produk negara berkembang. India berharap bahwa pengurangan tersebut akan menghilangkan distorsi di pasar komoditas sehingga dapat meningkatkan volume perdagangan negara-negara berkembang.

Tujuan utama dari strategi diplomasi India di WTO adalah untuk melindungi kepentingan petani India. Profesi yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat serta sektor yang sensitif dari kebijakan tarif. India bersama Cina dan Brazil merupakan negara yang sangat kritis dalam setiap persidangan *World Trade Organization (WTO)* terutama dalam menentang sikap Negara maju yang lebih bersikap protektif terhadap pasarnya. India bersama Negara-negara berkembang lainnya menolak keinginan negara maju yang selalu mendesak pembukaan akses pasar Negara berkembang bagi seluruh produk dan investasi negara maju. India berpendapat bahwa kesepakatan Doha tahun 2001 telah menimbulkan ketidakseimbangan antara negara maju dan negara berkembang.

Pandangan kritis India dalam pertemuan-pertemuan WTO, diantaranya:

1. Perlu adanya daftar produk bagi negara berkembang untuk mengembangkan pertanian dan industrinya.
2. Adanya mekanisme khusus atas meningkatnya volume produk pertanian negara-negara berkembang.
3. Pemotongan subsidi pertanian yang besar di negara-negara maju.

Tiga isu tersebut merupakan pokok permasalahan yang menjadi dasar bagi India untuk menghindari eksploitasi ekonomi secara global. India berpendapat bahwa reformasi dalam mekanisme kinerja WTO harus menghormati dimensi pembangunan; melindungi kepentingan petani miskin dan industri di negara-negara berkembang.

Dalam pertemuan WTO tahun 2005 di Hongkong, India berhasil membentuk aliansi bersama negara-negara berkembang melalui G-20 dan G-33 untuk membela kepentingan bersama. India menolak kebijakan negara maju yang memberikan subsidi kepada petaninya karena kebijakan negara maju tersebut dianggap telah menghambat masuk produk negara berkembang. India menuntut agar WTO lebih mengutamakan suara mayoritas atau suara negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan internasional yang seimbang (Gopinath & Laborde, 2008: 14-17).

Sejak tahun 2008, India berhasil melaksanakan skema preferensi tariff yang menguntungkan bagi anggota WTO terutama negara berkembang. Skema kebijakan tersebut memberikan peluang pilihan 90% lebih bagi ekspor yang didominasi produk pertanian (*WTO Studies*, Vol. 1 No. 1 July-August, 2008, hal 7). Dari kebijakan tersebut, beberapa negara berkembang telah mendapatkan keuntungan bagi negaranya seperti Kambija, Tanzania, Ethiopia, Mozambik, Samoa dan Malawi.

Pada bulan September 2009, India juga berhasil mempengaruhi 40 Menteri Perdagangan dari seluruh dunia untuk segera mengakhiri proteksionisme perdagangan sampai batas waktu tahun 2010. PM. Manmohan Singh juga terus mengangkat masalah proteksionisme negara maju dalam pertemuan KTT G-20 dan mengusulkan India sebagai tuan rumah dalam pertemuan WTO tahun 2010 ("Early conclusion of WTO talks in India's interest: Sharma", <http://www.thaindian.com/newsportal/politics/>). Upaya diplomasi India dalam pertemuan WTO menjadikannya sebagai aktor kritis dalam menyikapi hubungan negara maju dan negara sedang berkembang.

Di sisi lain negara-negara maju menyatakan India sebagai penyebab kegagalan berbagai perundingan WTO. Misalnya, pertemuan tahun 2003 di Mexico dan tahun 2006 di Hong Kong. Amerika Serikat dan Uni Eropa menuduh India ingin menggagalkan perundingan WTO. Negara-negara maju menilai sebagai langkah kemunduran bagi perekonomian global. Negara-negara maju berupaya menekan negara berkembang seperti India untuk bersikap lunak dalam berbagai perundingan.

Berbagai upaya diplomasi yang dilakukan Manmohan Singh diatas menunjukkan kesungguhan pemerintah India menjaga keamanan pangan India dan melindungi kepentingan petaninya. Tanpa adanya kebijakan secara terintegrasi antara upaya domestik dan internasional dalam jangka panjang pertanian India akan mengalami kondisi yang memprihatinkan. Perusahaan agribisnis multinasional negara-negara maju yang beroperasi di India, yang menggunakan pupuk kimia, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan jutaan petani akan kehilangan mata pencaharian.

Penutup

Sejarah India yang pernah mengalami bencana kelaparan memberikan pelajaran bagi India untuk menjaga keamanan pangannya. Meskipun India saat ini menjadi kekuatan ekonomi global namun jumlah penduduk yang besar dan tingginya angka kemiskinan menyebabkan pemerintah India tetap memberikan perhatian utama terhadap keamanan pangan. Revolusi Hijau yang pada awalnya diharapkan sebagai solusi dalam keamanan pangan India dalam perkembangannya menimbulkan berbagai masalah baru seperti eksploitasi kesuburan tanah.

Pada masa Manmohan Singh, India cukup berhasil memajukan sektor pertanian. Keberhasilan ini disebabkan adanya kesungguhan pemerintah untuk memajukan sektor tersebut. Kebijakan yang ditempuh Manmohan Singh untuk mengatasi keamanan pangan India dilakukan melalui kebijakan domestik dan internasional. Kebijakan domestik antara lain meliputi revitalisasi aset tanah pertanian dan pembangunan sarana irigasi.

Sedangkan kebijakan eksternal secara intensif dilakukan melalui kerjasama teknis dengan negara lain. Kerjasama teknis ditempuh melalui kerjasama dengan negara-negara Afrika, Asia maupun Eropa. Upaya intensif juga dilakukan India melalui WTO. India berpendapat salah satu penyebab kemiskinan dan tidak berkembangnya sektor pertanian di negara berkembang adalah tata ekonomi dunia yang timpang. Selama ini negara maju dinilai banyak merugikan negara berkembang. Negara berkembang diharuskan mengikuti *fair trade*, sementara negara maju melindungi produk pertanian mereka. Hal ini berimplikasi pada sulit masuknya produk-produk dari negara berkembang ke negara maju. Kesungguhan Manmohan Singh untuk menjaga keamanan pangannya dan melindungi petaninya merupakan upaya yang perlu diikuti Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anonim. (t.t.) "Organic Farming in India", [diakses 14 Desember 2010] <http://www.organicfacts.net/organic-cultivation/organic-farming/organic-farming-in-india.html>
- Azad India Foundation (t.t.). "Poverty in India", [diakses 14 Desember 2010] <http://www.azadindia.org/social-issues/poverty-in-india.html>
- Department of Agriculture and Agri-food, India. (2008). "India Agricultural Policy Review". *Agriculture and Agri-food Canada*, Vol. 4, No. 3, September 2008.
- Departement of Agriculture and co-operation India (2010). *Agricultural Trade 2009-2010*.
- (2010) "Progress", [diakses 27 Desember 2010] <http://www.hpagriculture.com/achivements.htm>
- (2007). *Natural Resource Management 2006-2007*.
- (2007). *Asset Reforms to Empower Farmers: National Policy for Farmers*.
- (2007). *Rainfed Farming System 2006/2007*.
- "India, WTO and trade Issues: Bi-monthly Newsletter of Centre for WTO Studies", *WTO Studies*, Vol. 1 No. 1 Juli-Agustus, 2008.
- Food and Fertilizer Technology Center for the Asia and Pacific Region (2008). *Monitoring and Management of Agricultural Water Quality for Green Food Production*, [diakses 19 Januari 2011] <http://www.agnet.org/library/ac/2008c/>.
- Gopinath, Munisamy dan David Laborde (2008). Implications for India of the May 2008 Draft Agricultural Modalities. Dalam: *ICTSD Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development*, Juni 2008.
- Government of India (t.t.) *National Project on Organic Farming*, [diakses 26 Desember 2010] <http://india.gov.in/sectors/agriculture/national.php>.
- Government of India (t.t.). *Technology Mission on Oilseeds, Pulses and Maize*, [diakses 24 Januari 2011] http://india.gov.in/sectors/agriculture/tech_mission.php.

- Government of India (t.t.) "Kebijakan Pangan India", [diakses 16 Desember 2010] <http://www.foodindustryindia.com/newfood/newsbycategory.jsp?n=Food%20Policy&id=26>.
- Ministry of Labour and Employment India (2010). *The People On Employment*.
- Penerbit Buku Kompas (2007). *India: Bangkitnya Raksasa Baru Asia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Terhune Lea, "South Asia Faces Food Crisis Despite India's High Productivity", [diakses 19 Desember 2010] <http://www.america.gov/st/business-english/2008/June/20080630174053mlenuhret0.4272882.html>.
- Thaindian News (t.t.) "Early conclusion of WTO talks in India's interest: Sharma", [diakses 19 Januari 2011] <http://www.thaindian.com/newsportal/politics/>.
- US Department of State (2010). "Background Note: India", [diakses 14 Desember 2010] <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3454.htm>.
- Venkatasubramanian, K. (2010). "Land Reforms Remain an Unfinished Business", [diakses 26 Desember 2010] <http://planningcommission.nic.in/reports/articles/venka/index.php?repts=m-land.htm>

--o0o--